



**MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DI KABUPATEN PATI**

Oleh

Satria Nur Rohman, Dyah Lituhayu, Hesti Lestari

satrianurrohman95@gmail.com, lituhayudyah@yahoo.co.id, hestilestari1959@gmail.com

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACTION

Pati Regency ranks 95 out of 394 cities or districts for flood disasters. This proves that the highest natural disaster threat, as well as the most vulnerable one in Pati District, is flood alarms that often occur during the rainy season every year. During the years 2020–2022, flood disasters in Pati District continued to increase, both in terms of the affected area, the depth of water, and the duration of the water receding. Up to this point, the Regional Disaster Management Agency of Pati District, as a department responsible for addressing the phenomenon of floods, continues to strive to mitigate these occurrences. The purpose of this study is to describe and identify the supporting and inhibiting factors of the Regional Disaster Management Agency of Pati District in flood disaster management. The research method used is qualitative descriptive using management theory, according to George R. Terry in Harsuki 2012, p. 79. Based on the disaster management conducted, several functions have been well executed, including planning, organizing, and mobilizing. The implementation of flood disaster management is carried out collaboratively with local departments, stakeholders, and volunteers. However, there are obstacles in the supervision function, namely the lack of scheduled organizational performance evaluations. Other obstacles include a lack of facilities, personnel, and budget for the Regional Disaster Management Agency of Pati District.

Keywords: Flood, Management, Disaster Management.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana banjir disebagian wilayah Indonesia, hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus ditanggulangi. Menurut Sutupo Purwo Nugroho (2015) keadaan bencana banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terbanyak yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kabupaten Pati merupakan daerah di Indonesia yang memiliki daerah rawan banjir yang cukup banyak.

Menyadari kerentanannya terhadap bencana, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah pelengkap pada saat terjadi bencana. Landasan pembentukan BNPB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 milik Badan Penanggulangan Bencana. Pemenuhan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah terlihat melalui pembentukan BNPB. Penanggulangan bencana banjir di daerah yang berperan dan memiliki tanggung jawab terbesar ialah Berpedoman pada arahan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai organisasi pemerintah

yang independen terhadap departemen tertentu, yang mengawasi penanggulangan bencana di berbagai wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang struktur dan protokol operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, BPBD Kabupaten Pati berfungsi sebagai badan yang bertugas melakukan mitigasi bencana alam, dengan fokus khusus. Tentang penanggulangan banjir di wilayah hukum Kabupaten Pati. BPBD Kabupaten Pati berperan penting dalam mendukung Bupati dengan ikut aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, BPBD melaksanakan berbagai tanggung jawab, yang dituangkan dalam (BPBD Kab. Pati, 2019) :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan bencana.
- 2) Memberikan bantuan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka bencana.
- 3) Memberikan bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peralatan regional, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi, serta kesiapsiagaan dan pencegahan keadaan darurat.

- 4) Melaksanakan kegiatan pelaporan, pengkajian, dan pemantauan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- 5) Mengawasi administrasi, keuangan, personel, peralatan, dan fasilitas di lingkungan BPBD; dan
- 6) Memenuhi tugas tambahan yang diberikan jika diperlukan.

“Kabupaten Pati memiliki peringkat 95 dari 394 kota atau kabupaten untuk bencana banjir.” (BNPB, 2020). Hal itu tergolong tinggi dibanding Bencana yang lain yaitu gempa, tanah longsor dan kekeringan.

BPBD Kabupaten Pati dalam hal penanggulangan bencana banjir memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terdampak bencana banjir, agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik BPBD haruslah memiliki strategi yang tepat. Mengenai hal tersebut diatur juga dalam peraturan bupati pati nomor 118 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati pati nomor 27 tahun 2018 tentang rencana strategis badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pati tahun 2017-2022.

Tabel 1.1
Daftar Kecamatan Di Kabupaten
Pati Terkena Bencana Banjir

Nama Kecamatan	Tahun
Kecamatan Pati	2020
Kecamatan Tambakromo	2021
Kecamatan Winong	
Kecamatan Pucakwangi	
Kecamatan Gabus	2022
Kecamatan Tambakromo	
Kecamatan Winong	
Kecamatan Gabus	
Kecamatan Juwana	
Kecamatan Jakenan	
Kecamatan Sukolilo	

Sumber : Diolah Peneliti Dari Berbagai Sumber, 2023.

Berdasarkan laporan data per tanggal 2 Desember 2022, pukul 10.00, pengungsian terdapat di Desa Sinomwidodo berjumlah 200 jiwa. Korban jiwa tercatat dua orang atas nama Sumirah (65) dan Su Ami (61) warga Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo. Sedangkan luka ringan ada tujuh orang berasal dari Sinomwidodo. Data rumah rusak sementara, di Desa Sinomwidodo ada tiga unit rumah roboh, 212 unit rusak sedang dan 417 unit rusak ringan. Adapun, di Desa Godo ada dua rumah terdampak

banjir. Sementara itu, ada beberapa infrastruktur yang terhempas banjir. Tercatat ada 2 jembatan penghubung antar dukuh yang ambrol di Desa Kropak, Kecamatan Winong sebuah jalan penghubung tergerus aliran sungai dan satu desa di Desa Gunungpanti Kecamatan Winong ambrol. Selain itu, 21 ternak tercatat terdampak. Rinciannya 12 ekor kambing hanyut, tiga ekor sapi hanyut, dan enam ekor sapi mati di kandang (jatengprov.go.id).

Gambar 1.

Kondisi Lokasi Terdampak Banjir



(Sumber : jatengprov.go.id)

Gambar 2.

Hewan Ternak Terdampak Banjir



(Sumber : <https://www.tvonenews.com/>)

Meski dua bulan berselang, sejumlah desa di Pati masih juga kebanjiran. Bahkan ketinggian banjir dilaporkan kembali meninggi. Setidaknya ada lima desa yang kini tergenang banjir. Kondisi itu seperti yang terjadi di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo. Banjir masih menggenangi sejumlah rumah warga hingga jalan raya penghubung Kayen – Kudus. Kondisi banjir justru semakin meninggi (suaramerdeka-muria.com).

Adanya masalah pada saat terjadi bencana banjir lokasi daerah yang terkena dampak banjir mengalami kerugian dari segi material dan non material seperti kerusakan bangunan-bangunan, kesulitan air bersih, kehilangan harta benda, timbulnya penyakit, melumpuhkan aktifitas masyarakat. BPBD Kabupaten Pati akan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka untuk memulihkan kondisi daerah terdampak banjir agar kembali seperti semula dan mencegah terjadinya bencana.

Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pati sudah mengupayakan untuk mengatasi masalah bencana banjir yang ada di Kabupaten Pati. Patikab.go.id, (2014) ada upaya-diterapkan oleh pemerintah pati mengatasi banjir seperti.

- 1) Sistem saluran air yang baik
- 2) Disipli membuang sampah

- 3) Pembersihan saluran air
 - 4) Kerja sama yang baik dari seluruh pihak
- Berdasarkan apa yang pernah dilakukan tersebut pada kenyataannya semakin ke sini bencana banjir di Kabupaten Pati semakin parah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Pemerintah Kabupaten Pati belum banyak membuahkan hasil. Masih ada beberapa wilayah yang masih terkena bencana banjir disertai lamanya surutnya air setiap tahunnya. Ada beberapa permasalahan dalam penanganan bencana banjir ini seperti luasnya cakupan wilayah, kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta terbatasnya sumber dana yang ada. Mengapa penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak bisa menyelesaikan masalah lamanya surutnya air banjir dengan cepat?. Berdasarkan keadaan tersebut, perlunya dilakukan manajemen penanggulangan yang nantinya mencakup rencana, pelaksanaan, dan evaluasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menangani bencana banjir dengan maksud adanya sistem manajemen upaya yang dilakukan dapat memberikan arah yang jelas dalam penanggulangan bencana banjir, meninjau kekuatan BPBD yang akan digunakan agar

dapat membuat langkah-langkah yang efektif serta efisien, serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dapat timbul dalam penanggulangan bencana banjir supaya dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses yang ada. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Pati.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Pati?.
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Pati.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik telah ada sejak lama, belakangan ini oleh para ahli telah diubah namanya menjadi administrasi negara. Oleh karena itu, Di Indonesia, konsep administrasi publik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro sebagaimana dikutip dalam Sodikin (2015:5) mengemukakan lima definisi administrasi publik, di antaranya adalah:

- 1) Administrasi publik Mencakup cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beserta keterkaitannya;
- 2) Administrasi publik Melibatkan upaya kelompok kooperatif dalam konteks pemerintahan;
- 3) Administrasi publik Menuntut kerja kelompok kolaboratif dalam lingkungan pemerintahan dan Menjadi elemen penting dalam proses politik karena signifikansinya dalam membentuk kebijakan publi. Ini adalah komponen penting dari proses politik dengan berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan Negara;
- 4) Administrasi publik memelihara hubungan dekat dengan berbagai organisasi swasta dan individu yang menyediakan layanan masyarakat

(Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan banyak organisasi swasta dan individu yang menawarkan layanan masyarakat);

- 5) Administrasi publik menunjukkan perbedaan besar dari administrasi swasta.

Setelah mencermati beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik melibatkan upaya kolaboratif sekelompok individu dalam organisasi publik untuk mengatasi masalah publik melalui perumusan kebijakan publik. Selanjutnya, manajemen publik yang baik mencakup proses manajemen yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara.

Keterkaitan Administrasi Publik dengan penelitian nantinya perlu diketahui bahwa administrasi mencakup banyak hal memiliki cakupan yang luas. Dengan adanya administrasi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Selain kesejahteraan, ketentraman, kepuasan juga akan dirasakan oleh masyarakat setempat.

2. Paradigma Administrasi Publik

Berbicara mengenai administrasi publik maka tidak terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi selama ini. Secara singkat paradigma adalah cara berpikir yang

dianut oleh seorang individu atau sekelompok individu. Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma Administrasi Negara yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Di dalam paradigma ini, administrasi harus dianggap netral nilai, bertujuan untuk efisiensi dan nilai ekonomi dalam tata kelola birokrasi. Perspektif ini menekankan peran “*birokrasi pemerintah*” namun kurang menekankan pada fokus.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi Gulick dan Urwick, yang meliputi penempatan staf, pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, merupakan fokus utama dari paradigma ini. Administrasi publik dibingkai berdasarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan dalam konteks apa pun. Penekanan pada prinsip-prinsip administratif ini menempatkan administrasi publik kurang spesifik pada lokasinya, karena dapat diterapkan secara efektif baik di organisasi pemerintah maupun swasta.

3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx, editor buku “*Elements of Public Administration*” tahun 1946, menimbulkan keraguan tentang kelayakan atau realisme mempertahankan pemisahan tegas antara politik dan administrasi. Senada dengan itu, Herbert Simon mengkritik penerapan prinsip-prinsip administrasi yang tidak merata. Administrasi negara, sebagaimana diamati dalam dua belas konteks ini, dibentuk oleh nilai-nilai tertentu dan bukannya menganut sikap bebas nilai atau universal. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value free administration* disatu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* lain pihak.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Di dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-?)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial.

Paradigma Penelitian Ini :

Kajian ini sejalan dengan paradigma *Governance* yang disebut sebagai paradigma keenam yang mengutamakan

jaringan pemerintah, kemitraan, dan kolaborasi. Berbeda dengan proses internal, organisasi, sumber daya keuangan, waktu, pengetahuan, dan kapasitas manusia, model pemerintahan baru ini lebih mementingkan jaringan, kemitraan, kolaborasi, dan berbagai faktor lain yang menekankan keterlibatan eksternal dalam pemerintahan.

3. Manajemen Publik

George R. Terry menyebutkan empat fungsi manajemen (Harsuki 2012:79):

- 1) Pengorganisasian Kemampuan untuk melihat ke depan berdasarkan tujuan tertentu dan merencanakan, memprediksi, dan memvisualisasikan.
- 2) Perencanaan Proses pengorganisasian melibatkan pemberian berbagai tugas kepada anggota kelompok dan memantau kontribusi mereka.
- 3) *Actuating* dalam manajemen, *actuating* melibatkan upaya manajer untuk melaksanakan tindakan, termasuk membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan tugasnya, memberikan bimbingan, mengeluarkan arahan, membantu anggota dalam meningkatkan hasil kerja melalui kreativitasnya, dan membina kolaborasi yang antusias.

4) Mengawasi dan Mengarahkan dalam peran manajerial pengawasan, manajer bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan untuk memastikan tugas yang direncanakan dilaksanakan dengan benar.

4. Manajemen Bencana

Keberhasilan manajemen bencana adalah adanya dukungan dari masyarakat dan instansi yang menjadi leading sector yaitu, BPBD (Setyawan et al, 2019:29). Urgensi manajemen bencana, yaitu melaksanakan kegiatan yang konkret guna pengendalian dan penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak negatif seperti dengan menyelamatkan korban, nyawa, dan kerugian harta benda secara cepat dan tepat. Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap bencana alam. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji bagaimana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir yang setiap tahunnya mengalami perluasan wilayah yang dilanda bencana banjir dari tahun 2020 – 2022.

5. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

sebelum, saat, dan setelah bencana. Kegiatan ini meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana dirinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meliputi.

- 1) Merumuskan kebijakan dan memberikan pedoman inisiatif penanggulangan bencana yang mencakup tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara merata dan berkeadilan.
- 2) Memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka untuk menetapkan standar dan persyaratan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 3) Merakit, mengidentifikasi, dan memperbarui peta risiko bencana.
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- 5) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- 6) Mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan

maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa.

- 7) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.
- 8) Membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan
- 9) Memenuhi tanggung jawab tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen bencana, merespons situasi pengungsi secara efisien dan efektif.
- 2) Merencanakan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan secara komprehensif pelaksanaan inisiatif manajemen bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, dimana informan yang dipilih merupakan informan yang terlibat mulai dari penyelenggara hingga sasaran yang berkaitan dengan

objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Pati

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan fenomena manajemen penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD sesuai dengan teori manajemen publik George R. Terry (Harsuki 2012:79), biasanya dikenal dengan singkatan "POAC" yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.

1) Perencanaan (*Planning*)

a) Mengatasi Tingginya Genangan Air Di Beberapa Daerah Kabupaten Pati

Perencanaan penanggulangan tingginya genangan air oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati melakukan kerja sama dengan dinas dan relawan seperti DISHUB, PUPR dan masyarakat. Di dalam kerja sama tersebut meliputi penyediaan fasilitas seperti alat berat, diesel, dan suplai makanan atau kebutuhan pokok masyarakat terdampak bencana. Kemudian terkait dampak yang diberikan dengan adanya kerja sama tersebut cukup signifikan biasanya ketinggian air yang tinggi dan cukup lama

surutnya sekarang kurang lebih 24 jam ketinggian air mulai berangsur surut.

b) Mengatasi Lamanya Air Surut Di Daerah yang Terkena Bencana Banjir

Perencanaan penanggulangan lamanya air surut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak melakukannya sendiri tetapi berkolaborasi atau menjalin kerja sama dengan dinas-dinas dan relawan setempat seperti DISHUB, PUPR, dan masyarakat terdampak. Ada upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah ini. Namun, fenomena tingginya genangan air dan lamanya air surut berbeda. Jadi, upaya yang dilakukan lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan bahan makanan dan suplai kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya korban. Karena lamanya air surut ini biasanya terjadi lebih dari dua hari dan hal tersebut mengganggu perekonomian masyarakat.

Analisis Fungsi Perencanaan (Planning):

Menurut berbagai pemaparan mengenai perencanaan Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati di atas dengan menggunakan teori menurut George R. Terry (dalam Harsuki) dapat disimpulkan

bahwa perencanaan Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati sudah dilaksanakan. Sudah terdapat upaya serta kerja sama atau kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kerja sama tersebut dijalin bersama DISHUB, PUPR, dan masyarakat. Namun, dalam keberjalanan upaya tersebut masih ada beberapa kekurangan yang menyebabkan ketidkemasimalnya suatu kegiatan seperti fasilitas yang dibutuhkan, personil dan anggaran yang kurang serta kondisi lingkungan yang terkena bencana.

Secara upaya dan kerja sama yang dilakukan sudah cukup maksimal mulai dari penyediaan alat berat, mesin diesel, suplai kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian dampak yang diberikan dengan adanya kerja sama tersebut kepada masyarakat cukup signifikan. Kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dari adanya kerja sama atau kolaborasi yang terjalin.

Hasil analisa di atas menunjukkan bahwa adanya upaya dan kerja sama atau kolaborasi yang dijalin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dengan dinas-dinas terkait untuk memajemen bencana banjir di beberapa daerah Kabupaten Pati dalam kurun waktu lima tahun kebelakang. Walaupun sudah cukup maksimal dalam

fungsi perencanaan ini ada beberapa hambatan yang ditemukan. Hambatan tersebut adalah kurangnya fasilitas, kurangnya personil, dan kurangnya anggaran yang dibutuhkan, serta kondisi lingkungan yang terjadi bencana. Hal tersebut terjadi karena fenomena yang terjadi yaitu tingginya genangan air dan lamanya air surut kejadiannya tak terduga walaupun dari segi kesiap siagaan BPBD sudah siap. Dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu BPBD terus menjalin kerja sama dengan dinas-dinas terkait agar tidak kuwalahan dalam menanggulangi suatu fenomena yang terjadi.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

a) Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012. Walaupun sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Namun, hambatan tersebut tidak timbul karena tidak melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang ada tetapi hambatan tersebut ada karena kebutuhan dan kejadian lapangan yang sifatnya tidak menentu.

Analisis Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*):

Menurut pemaparan hasil penelitian mengenai fungsi pengorganisasian di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam pengorganisasian tugas pokok dan fungsi untuk menanggulangi bencana banjir sudah berjalan dengan baik. Dimulai dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikoordinir dari atasan atau pimpinan kemudian didelegasikan ke setiap kbid-kbid kemudian baru ke staf-staf dibawahnya. Selain itu, baiknya proses pengorganisasian ini didukung dengan adanya kebijakan teknis dari setiap bidang dalam mengatasi bencana yang nantinya kemungkinan bisa terjadi.

Akan tetapi, proses pengorganisasian yang sudah dibilang baik masih terdapat hambatan-hambatan. Namun, hambatan tersebut tidak timbul karena tidak melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang ada tetapi hambatan tersebut ada karena kebutuhan dan kejadian lapangan yang sifatnya tidak menentu.

Dengan demikian, adanya hambatan-hambatan yang masih terjadi tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati lebih ditingkatkan lagi. Karena yang menjadi hambatan bukan karena tidak dilaksanakannya salah satu tugas dan fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati. Namun, diakibatkan oleh kondisi yang terjadi saat itu.

3) Pergerakan (*Actuating*)

a) Sosialisasi kepada Masyarakat

Salah satu upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dalam manajemen penanggulangan bencana banjir melalui fungsi pergerakan (*actuating*) yaitu sosialisasi. Di dalam prosesnya mengikutsertakan unsur masyarakat. Selain itu, dari adanya sosialisasi tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat.

b) Pelaksanaan Pemantauan Cuaca dan Sistem Peringatan Dini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini dibantu oleh pihak TNI dan Polri dimana dalam koordinasinya bisa melalui *WhatsApp*, HT (*Handy Talky*). Selain melalui media tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memasang alat EWS (*Early Warning System*) di beberapa daerah rawan bencana banjir di lima tahun terakhir yaitu Juwana, Kayen, Winong, dan Tambakromo. Namun, alat EWS (*Early Warning System*) pada saat ini beberapa mengalami kerusakan yang menyebabkan ketidakmampuannya suatu alat dalam menjalankan fungsinya.

c) Sistem Pengendalian Banjir

Di dalam melakukan sistem pengendalian ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak dilakukannya sendiri melainkan berkoordinasi dengan dinas dan Pemerintah Kabupaten Pati. Akan tetapi, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memberikan dukungan apabila apa yang sudah dilakukan dinas lain atau Pemkab Pati belum maksimal. Selain itu, kolaborasi yang dijalin sudah cukup baik. Namun, masih ada hambatan-hambatan yang ditemui.

Analisis Fungsi Penggerakan (*Actuating*):

Menurut berbagai pemaparan mengenai fenomena pergerakan dalam manajemen penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini, serta sistem penanggulangan banjir. Dapat dikatakan apa yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pati sudah cukup baik.

Pertama, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Di dalam melakukan sosialisasi sudah efektif dan efisien. Hal tersebut dilihat dari proses pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan setiap masyarakat. Karena jumlah masyarakat setiap desa banyak dan tidak

memungkinkan untuk dijadikan satu forum. Akhirnya setiap desa diambil 10 sampai 15 perwakilan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BPBD. Dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Tingkat kewaspadaan terhadap suatu bencana meningkat artinya mereka sudah siap apabila terjadi suatu fenomena bencana banjir.

Kedua, pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini. Di dalam pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu oleh pihak TNI dan Polri dimana dalam koordinasinya bisa melalui *WhatsApp*, HT (*Handy Talky*). Selain melalui media tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memasang alat EWS (*Early Warning Sytem*) di beberapa daerah rawan bencana banjir di lima tahun terakhir yaitu Juwana, Kayen, Winong, dan Tambakromo. Namun, alat EWS (*Early Warning Sytem*) pada saat ini beberapa mengalami kerusakan yang menyebabkan ketidakmasilnya suatu alat dalam menjalankan fungsinya.

Ketiga, sistem pengendalian banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak melakukannya sendiri melainkan berkoordinasi dengan dinas dan

Pemerintah Kabupaten Pati seperti, DLH, Perhutani, DISHUB, dan PUPR. Akan tetapi, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memberikan dukungan apabila apa yang sudah dilakukan dinas lain atau Pemkab Pati belum maksimal. Selain itu, kolaborasi yang dijalin sudah cukup baik. Namun, masih ada hambatan-hambatan yang ditemui.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas bentuk sosialisasi, pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini, serta sistem pengendalian banjir menjadi suatu hal yang positif dalam upaya manajemen penanggulangan bencana banjir di beberapa daerah Kabupaten Pati. Terlepas sudah baiknya apa yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati masih dijumpai hambatan seperti rusaknya alat dalam hal sistem peringatan dini. Hal tersebut harus segera disikapi misalnya memasukkan agenda tersebut ke dana anggaran tahun berikutnya. Hal tersebut bertujuan ketika terjadi hal semacam itu atau kerusakan suatu fasilitas dapat segera diambil tindakan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mengenai manajemen penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Pati menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan visi dan misi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012. Pengawasan di dalam manajemen penanggulangan bencana banjir juga mempengaruhi fungsi manajemen yang lain. Karena apabila fungsi pengawasan ini tidak berjalan sesuai apa yang seharusnya maka akan berdampak buruk dalam melakukan tindak manajemen penanggulangan bencana banjir itu sendiri.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan fungsi pengawasan dalam suatu tindakan manajemen sangat penting. Karena apabila fungsi pengawasan ini tidak berjalan sesuai apa yang seharusnya maka akan berdampak buruk dalam melakukan tindak manajemen penanggulangan bencana banjir itu sendiri. Walaupun evaluasi kinerja yang dilakukan belum dilakukan secara terstruktur harapannya untuk kedepan evaluasi kerja ini bisa dilakukakn secara rutin atau terjadwal. Harapannya dalam melakukan manajemen penanggulangan bencana banjir lebih optimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Pati

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung fungsi perencanaan adalah adanya upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati. Upaya tersebut salah satunya adalah dalam melakukan upaya tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak dilakukan sendiri melainkan menjalin kerja sama atau kolaborasi bersama dinas, stakeholder setempat seperti, DISHUB, PUPR, Dandim/TNI, Polri. Selain itu, BPBD juga menggandeng relawan masyarakat dalam memanajemen penanggulangan bencana banjir ini.

Faktor pendukung yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dalam manajemen penanggulangan bencana banjir difokuskan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012. Di dalam prosesnya dimulai dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikoordinir dari atasan atau pimpinan kemudian didelegasikan ke setiap kbid-kbid kemudian baru ke staf-staf dibawahnya. Selain itu, baiknya proses pengorganisasian ini didukung dengan adanya kebijakan teknis dari setiap bidang dalam mengatasi bencana yang nantinya kemungkinan bisa terjadi. Kebijakan teknis tersebut salah satunya adalah peta bencana. Selain itu, dalam bentuk pertanggung jawaban pimpinan dan setiap

kepala bidang memiliki tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang ada dalam BPBD ikut bertanggung jawab setiap apa yang dikerjakan.

Faktor pendukung keberhasilan selanjutnya adalah fungsi penggerak. Di dalam fungsi penggerak terdapat beberapa program yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini serta sistem pengendalian banjir. Secara pelaksanaannya semua program diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Pati. Pertama, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Di dalam melakukan sosialisasi sudah efektif dan efisien. Hal tersebut dilihat dari proses pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan setiap masyarakat. Kedua, pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini. Di dalam pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu oleh pihak TNI dan Polri dimana dalam koordinasinya bisa melalui *WhatsApp*, HT (*Handy Talky*). Walaupun terjadi kendala listrik mati atau kendala sinyal dengan adanya HT (*Handy Talky*) menjadi satu solusi untuk menyebarluaskan suatu informasi. Selanjutnya adalah sistem pengendalian

banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak melakukannya sendiri melainkan berkoordinasi dengan dinas dan Pemerintah Kabupaten Pati seperti, DLH, Perhutani, DISHUB, dan PUPR.

b) Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan salah satu yang menunjukkan fungsi pengawasan ini menjadi faktor penghambat adalah tidak dilakukannya evaluasi kinerja organisasi secara terjadwal. Evaluasi kinerja menjadi titik penting dalam suatu organisasi. Dilakukannya evaluasi kinerja organisasi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang telah dilakukan. Tidak adanya evaluasi kinerja organisasi ini memicu penurunan kinerja organisasi dan manajemen penanggulangan bencana banjir tidak berjalan secara maksimal.

PENUTUP

B. Kesimpulan

1) Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pati sebagian sudah berjalan dengan baik.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam manajemen penanggulangan bencana banjir menunjukkan bahwa adanya upaya dan kerja sama yang dijalin Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (BPBD) Kabupaten Pati dengan dinas-dinas terkait, seperti DISHUB, PUPR mulai dari penyediaan fasilitas alat-alat berat dan mesin penyedot air.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
Pengorganisasian tugas pokok dan fungsi untuk menanggulangi bencana banjir sudah berjalan dengan baik. Dimulai dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikoordinir dari atasan serta didukung dengan adanya kebijakan teknis dari setiap bidang.
 - c. Penggerakan (*Actuating*)
 - a) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Di dalam melakukan sosialisasi sudah efektif dan efisien. Hal tersebut dilihat dari proses pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan setiap masyarakat.
 - b) Pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini. Di dalam pelaksanaan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu oleh pihak TNI dan Polri dimana dalam koordinasinya bisa melalui WhatsApp, HT (*Handy Talky*) dan dibantu dengan alat EWS (*Early Warning Sytem*).
 - c) Sistem pengendalian banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak melakukannya sendiri melainkan berkoordinasi dengan dinas dan

Pemerintah Kabupaten Pati seperti DLH, Perhutani, DISHUB, dan PUPR.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mengenai manajemen penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kurang baik dalam pelaksanaannya.

- 2) Fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan menjadi faktor pendukung dalam upaya manajemen bencana banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pati. Fungsi manajemen pengawasan (*controlling*) menjadi faktor penghambat karena tidak dilakukannya evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi menjadi titik penting dalam suatu organisasi. Di dalam evaluasi kinerja dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang telah dilakukan. Tidak adanya evaluasi kinerja organisasi ini memicu penurunan kinerja pegawai dan manajemen penanggulangan bencana banjir tidak berjalan secara maksimal walaupun secara visi dan misi serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sudah dilaksanakan.

C. Saran

3. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Kerja sama yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dalam upaya manajemen penanggulangan banjir bersama DISHUB, PUPR, DLH, dan Perhutani harus terus dijalin. Karena melihat dari segi fasilitas, personil, dan anggaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Pati cukup terbatas.
- b. Terkait alat sistem peringatan dini EWS (Early Warning Sytem) yang beberapa sudah rusak sebaiknya segera diambil tindakan. Apabila memang terkendala anggaran bisa memasukkan agenda untuk pembelian alat sistem peringatan dini ke anggaran tahun berikutnya.
4. Pimpinan sebaiknya melakukan evaluasi kinerja organisasi secara terjadwal. Perlu dilakukannya pembinaan terhadap kinerja organisasi. Mulai dari mingguan atau bisa perbulan. Selain itu, semua bentuk pemantauan lebih dilakukan secara rutin seperti pemantauan wilayah rekonstruksi, pengerukan dan pembersihan sungai. Apabila hal-hal tersebut bisa ditingkatkan upaya dalam menanggulangi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Angrelia, C., Prihasta, R., Mubarok, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*.

Astuti, A. M. (2014). Analisis PEIL Kawasan Gondolayu Lor Berdasarkan Debit Banjir Sungai Code. 6-21.

Ligal. 2008. Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir. Palembang :Universitas Sriwijaya Palembang.

Mahardika, D dan E. Larasati. 2018. "Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang", *Journal of Public Policy Vol 3*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Murdiyanto, M., dan Gutomo, T. (2018). *Flood and Landslide Natural Disasters and Its People Prevention Effort. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14(4), 437452.

Nasyirudin, M. M. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng. *Otoritas*, 157-173.

Rachman, T. (2018). Faktor faktor yang menyebabkan bencana banjir dan adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10-27.

Rahayu, I.P.,Rompas W Dan Dengo,S. (2021). Implementasi Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).

Saputra,N.G.,Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang Di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 62-76.

Usman, F. R, dkk. 2019. “Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Berbasis Mikrokontroler Arduino”, *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering Vol 1*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.

Wiguna, S dkk. 2020. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.